



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2022-2023**

SELASA, 4 OKTOBER 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2022**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2022-2023**

SELASA, 4 OKTOBER 2022

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Masa Persidangan ini telah berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2022 dan akan berakhir pada hari ini. Selanjutnya DPR RI akan memasuki Masa Reses, dimulai pada tanggal 5 Oktober 2022.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya hormati,

Pada masa sidang ini, sebagian besar perhatian dari rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan DPR RI adalah mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya serta rencana anggaran dan belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2023. AKD DPR RI juga tetap menuntaskan tugas-tugas

konstitusional lainnya yaitu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

Dalam pemulihan sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, rakyat masih berada dalam kondisi yang rentan atas gejolak ekonomi. Rakyat masih banyak menanti berbagai program pembangunan nasional dapat dirasakan manfaatnya.

Rakyat mengharapkan dapat menikmati pelayanan publik, mendapatkan pemberdayaan ekonomi, memperoleh perlindungan sosial, dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur. Harapan rakyat tersebut, menjadi amanat bagi DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk dapat mewujudkan amanat kedaulatan rakyat tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.

Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah, telah berhasil menyelesaikan Rancangan Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu.

Adanya pelindungan data pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Melalui Undang Undang ini menjadi jelas pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi data warga negara.

DPR RI telah mengesahkan 2 (*dua*) Rancangan Undang Undang menjadi Usul Inisiatif DPR RI, yaitu:

1. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan
2. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

DPR RI juga telah menerima Surat Perintah Presiden untuk melakukan pembahasan terhadap 2 (*dua*) judul Rancangan Undang Undang, yakni:

1. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan
2. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut, secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat.

Fungsi legislasi DPR RI, merupakan perwujudan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya memiliki berbagai dimensi; politik, sosial, ekonomi, dan kepentingan kelompok. Oleh karena itu, proses dalam pembentukan Undang Undang harus dilakukan secara terbuka, sehingga dapat memastikan bahwa produk Undang Undang yang dihasilkan benar-benar untuk kepentingan nasional.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya hormati,

Berbagai risiko global masih mengancam ketahanan APBN dan perekonomian kita. Ketidakpastian perekonomian dan tingginya risiko global tahun ini, diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023.

Dinamika perekonomian global pada tahun 2023, diperkirakan masih akan menghadapi lonjakan inflasi global akibat *supply disruption*, kebijakan moneter global, perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, serta potensi terjadinya stagflasi yang luas.

Dinamika global tersebut dapat membawa resiko terhadap kondisi perekonomian nasional dan ketahanan APBN sebagai instrumen fiskal yang dapat menjaga perekonomian nasional.

Dalam mengantisipasi situasi dan kondisi perekonomian tahun 2023 yang penuh tantangan

tersebut, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dan penetapan APBN Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan fiskal tahun 2023, akan dijalankan dengan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi supply untuk meningkatkan produktivitas.

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, akan diarahkan untuk:

1. meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat yang tepat manfaat dan tepat sasaran; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
2. meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial;

3. melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial yang efektif dan lebih tepat sasaran;
4. melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, serta pembangunan IKN secara bertahap, yang dilengkapi dengan desain penganggaran dan pembangunannya agar dapat berkesinambungan;
5. meningkatkan kualitas Pelaksanaan anggaran transfer ke daerah (TKD);
6. menjaga efektivitas Pembiayaan anggaran dengan melakukan pengelolaan utang secara prudent, sustainable, kredibel serta mengendalikan tingkat risiko utang pada level aman, dan terus mengupayakan pendalaman pasar keuangan;
7. meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU.

Menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk dapat menjalankan APBN Tahun Anggaran 2023, yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat; rakyat merasakan hidupnya semakin lebih baik dan sejahtera; dan APBN dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya hormati,

Paska kebijakan pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait juga mendengarkan dan memberikan perhatian yang besar atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang dipengaruhi oleh situasi global dan berdampak besar terhadap kehidupan rakyat.

DPR RI, melalui fungsi pengawasan dan Alat Kelengkapan Dewan terkait, memastikan Pemerintah harus dapat mengantisipasi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak agar tidak mengakibatkan kualitas kesejahteraan rakyat menurun. Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang terkait, memastikan agar kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak selalu dievaluasi khususnya dampak terhadap kualitas kesejahteraan rakyat. DPR RI mendukung Pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran.

DPR RI juga memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, antara lain:

1. Validitas dan akurasi data penerima bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM);

2. Persoalan pertanahan, khususnya yang terkait dengan tanah rakyat dan mafia tanah;
3. Persiapan Pemilu 2024;
4. Peretasan data kementerian/lembaga;
5. Permasalahan tenaga honorer;
6. Permasalahan ketersediaan vaksin meningitis; dan
7. Pelaksanaan vaksinasi booster yang menurun dan dukungan terhadap penggunaan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, yakni Indovac dan Inavac untuk vaksin booster.

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam rangka melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan prinsip *check and balances* terhadap pemerintahan.

Pada Masa Persidangan I ini DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap:

1. 5 (*lima*) orang Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat masa jabatan 2022-2027 yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi VIII DPR RI.
2. 1 (*satu*) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masa jabatan 2022-2027 sebagai pengganti Harry Azhar yang telah dibahas oleh Komisi XI DPR RI.
3. 1 (*satu*) Calon Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2019-2023 yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.

DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 11 (*sebelas*) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia serta pertimbangan terhadap Pewarganegaraan Jordi

Amat Maas dan Sandy Henny Walsh untuk ditetapkan sebagai warga negara Indonesia.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dapat disaksikan oleh masyarakat.

Pada Masa Persidangan ini, DPR RI juga telah menetapkan Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi IV.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya hormati,

Pada tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober ini, kita akan melaksanakan forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Parliamentary Speakers Summit* (P20).

Sebanyak 20 negara dengan ekonomi terbesar telah mengkonfirmasi kehadiran delegasi-delegasinya untuk menghadiri *Parliamentary Speakers Summit* (P20). Hal ini

merupakan kesempatan bagi kita untuk membangun kerja sama internasional dan berperan serta dalam menentukan arah pemulihan secara global.

Parliamentary Speakers Summit (P20) merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi Parlemen Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus ikut memberikan dorongan inisiatif gagasan dan komitmen pembahasan pertemuan G20 yang akan diimplementasikan.

Kekuatan parlemen P20, yang mewakili masyarakat global, adalah legitimasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat global dan legitimasi atas upaya Pemerintah, dalam pemulihan pascapandemi dan merespons tantangan global saat ini, agar dapat menyelamatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat global menjadi lebih baik.

Atas nama Pimpinan, Kami mengundang seluruh Bapak Ibu yang terhormat Anggota DPR RI untuk ikut

menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan P20 yang diselenggarakan di DPR RI. Marilah kita tunjukan bersama kepada dunia, bahwa Indonesia dengan semangat gotong royongnya siap menjalin komitmen global dalam membangun dunia yang lebih baik, dunia yang sejahtera, tentram dan indah.

Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, delegasi DPR RI juga telah menghadiri beberapa pertemuan dan konferensi penting baik pada tingkat ASEAN maupun internasional.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya hormati,

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan kedaulatan dan harapan rakyat.

Saatnya kita memasuki masa reses, untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Selamat memasuki masa reses, sapaah rakyat di daerah pemilihan masing-masing, dan tetap jaga kesehatan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbinganNya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Lampiran:

➤ **5 (lima) RUU yang telah disetujui menjadi**

Undang Undang:

1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. RUU tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional);
3. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*);
4. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021; dan
5. RUU tentang RAPBN 2023.

- **2 (dua) RUU yang telah disetujui menjadi Rancangan Undang Undang Usul Inisiatif DPR RI:**
 1. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 2. RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

- **Asumsi dasar ekonomi makro 2023:**
 1. Pertumbuhan ekonomi, 5,3 persen;
 2. Inflasi, 3,6 persen;
 3. Nilai Tukar, Rp14.800 per USD;
 4. Suku Bunga SUN 10 Tahun, 7,9 persen;
 5. Harga minyak mentah Indonesia, USD90 per barel;
 6. *Lifiting* Minyak, 660 ribu barel per hari;
 7. *Lifiting* Gas, 1,1 juta barel setara minyak per hari;
 8. Pendapatan Negara sebesar Rp2.463,02 triliun;
 9. Belanja Negara sebesar Rp3.061,17 triliun
 10. Defisit sebesar Rp598,15 triliun atau 2,8 persen terhadap PDB.

➤ **Nama calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat masa jabatan 2022-2027:**

1. Dr. Deni Suardini, S.E., Akt., M.M., CFrA., CA., QIA., CGCAE.;
2. Heru Muara Sidik, Ak., CA., CMA., M.M., QIA.;
3. Dr. M. Dawud Arif Khan;
4. Dr. Mulyadi, S.E., M.M., M.Si., Akt., CA., CPMA., SAS.; dan
5. Dr. Rojikin, S.H., M.Si., QIA.

➤ **Nama calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masa jabatan 2022-2027:**

Ahmadi Noor Supit

➤ **Nama calon Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2019-2023:**

Johanis Tanak

➤ **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

- Sidang yang telah dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain:
 1. Sidang Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di India;
 2. Sidang Women Parliamentarians of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) Coordinating Committee di Kamboja;
 3. Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 14th Summit of Women Speakers of Parliament di Uzbekistan.